

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Filosofi

Pengertian landasan filosofis pendidikan yang mendasari penelitian ini adalah Konstruktivisme. Filosofi konstruktivisme adalah menciptakan pemahaman baru dengan menuntut aktivitas aktif dan progress, serta produktif dalam konteks nyata. Mengoptimalkan kompetensi kepala sekolah merupakan sebuah sistem yang harus dibangun secara konstruktif. Landasan filsafat yang digunakan merupakan dasar pijakan dalam mengoptimalkan kompetensi kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan. Filsafat konstruktivisme menjadi dasar atau pijakan Dinas Pendidikan dalam membina kompetensi kepala sekolah sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bermutu tinggi.

Sebagai lembaga formal pemerintah, Dinas Pendidikan memiliki peran vital dalam menyiapkan sumber daya manusia pendidikan yang berkualitas, khususnya kepala sekolah sebagai motor penggerak kebijakan dan pengembangan sekolah. Namun, hingga kini, upaya Dinas Pendidikan dalam melakukan improvisasi dan inovasi terhadap pembinaan calon kepala sekolah masih terbatas. Hal ini tercermin dari masih rendahnya mutu pendidikan di berbagai daerah, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi kepala sekolah. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Tangerang perlu menjadi pionir dalam menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan proses seleksi dan pembinaan kepala sekolah yang berbasis kompetensi.

Fenomena ini dapat ditelaah melalui perspektif konstruktivisme, yaitu sebuah pendekatan dalam teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak sekadar ditransfer dari guru ke siswa secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Teori konstruktivisme dipelopori oleh Jean Piaget, yang menyatakan bahwa proses belajar adalah proses aktif membangun struktur kognitif berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, Lev Vygotsky memperkuat konsep ini dengan

menambahkan unsur sosial-kultural melalui konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD), yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif optimal terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan tokoh yang lebih kompeten.

Jika teori konstruktivisme ini diterapkan dalam manajemen pendidikan, khususnya dalam konteks pembinaan kepala sekolah, maka proses peningkatan kompetensi tidak cukup dilakukan secara instruksional atau administratif semata. Kepala sekolah perlu dibina dalam konteks pengalaman nyata, diskusi reflektif, dan kolaborasi profesional agar mereka mampu membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepemimpinan secara mandiri dan kontekstual. Dengan demikian, strategi rekrutmen dan pembinaan kepala sekolah seharusnya dirancang sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan dan bermakna, bukan sekadar penugasan birokratis.

Sayangnya, pada praktiknya masih ditemukan pengangkatan kepala sekolah berdasarkan pertimbangan politis atau balas jasa, bukan hasil dari proses pembinaan yang konstruktif dan objektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar konstruktivisme yang menekankan pembentukan kompetensi melalui proses aktif, reflektif, dan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan sistem pembinaan kepala sekolah yang berbasis pada teori konstruktivisme menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan rendahnya mutu pendidikan, terutama dalam era perubahan yang dinamis seperti saat ini.

Sebagai lembaga formal pemerintah, Dinas Pendidikan memiliki peran vital dalam menyiapkan sumber daya manusia pendidikan yang berkualitas, khususnya kepala sekolah sebagai motor penggerak kebijakan dan pengembangan sekolah. Namun, hingga kini, upaya Dinas Pendidikan dalam melakukan improvisasi dan inovasi terhadap pembinaan calon kepala sekolah masih terbatas. Hal ini tercermin dari masih rendahnya mutu pendidikan di berbagai daerah, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi kepala sekolah. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Tangerang perlu menjadi pionir dalam menerapkan hasil-hasil

penelitian untuk meningkatkan proses seleksi dan pembinaan kepala sekolah yang berbasis kompetensi.

Fenomena ini dapat ditelaah melalui perspektif konstruktivisme, yaitu sebuah pendekatan dalam teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak sekadar ditransfer dari guru ke siswa secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Teori konstruktivisme dipelopori oleh Jean Piaget, yang menyatakan bahwa proses belajar adalah proses aktif membangun struktur kognitif berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, Lev Vygotsky memperkuat konsep ini dengan menambahkan unsur sosial-kultural melalui konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD), yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif optimal terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan tokoh yang lebih kompeten.

Jika teori konstruktivisme ini diterapkan dalam manajemen pendidikan, khususnya dalam konteks pembinaan kepala sekolah, maka proses peningkatan kompetensi tidak cukup dilakukan secara instruksional atau administratif semata. Kepala sekolah perlu dibina dalam konteks pengalaman nyata, diskusi reflektif, dan kolaborasi profesional agar mereka mampu membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepemimpinan secara mandiri dan kontekstual. Dengan demikian, strategi rekrutmen dan pembinaan kepala sekolah seharusnya dirancang sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan dan bermakna, bukan sekadar penugasan birokratis.

Sayangnya, pada praktiknya masih ditemukan pengangkatan kepala sekolah berdasarkan pertimbangan politis atau balas jasa, bukan hasil dari proses pembinaan yang konstruktif dan objektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar konstruktivisme yang menekankan pembentukan kompetensi melalui proses aktif, reflektif, dan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan sistem pembinaan kepala sekolah yang berbasis pada teori konstruktivisme menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan rendahnya mutu pendidikan, terutama dalam era perubahan yang dinamis seperti saat ini.

Sebagai lembaga formal pemerintah, Dinas Pendidikan memiliki peran vital dalam menyiapkan sumber daya manusia pendidikan yang berkualitas, khususnya kepala sekolah sebagai motor penggerak kebijakan dan pengembangan sekolah. Namun, hingga kini, upaya Dinas Pendidikan dalam melakukan improvisasi dan inovasi terhadap pembinaan calon kepala sekolah masih terbatas. Hal ini tercermin dari masih rendahnya mutu pendidikan di berbagai daerah, yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kompetensi kepala sekolah. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Tangerang perlu menjadi pionir dalam menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan proses seleksi dan pembinaan kepala sekolah yang berbasis kompetensi.

Fenomena ini dapat ditelaah melalui perspektif konstruktivisme, yaitu sebuah pendekatan dalam teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak sekadar ditransfer dari guru ke siswa secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Teori konstruktivisme dipelopori oleh Jean Piaget, yang menyatakan bahwa proses belajar adalah proses aktif membangun struktur kognitif berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, Lev Vygotsky memperkuat konsep ini dengan menambahkan unsur sosial-kultural melalui konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD), yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif optimal terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan tokoh yang lebih kompeten.

Jika teori konstruktivisme ini diterapkan dalam manajemen pendidikan, khususnya dalam konteks pembinaan kepala sekolah, maka proses peningkatan kompetensi tidak cukup dilakukan secara instruksional atau administratif semata. Kepala sekolah perlu dibina dalam konteks pengalaman nyata, diskusi reflektif, dan kolaborasi profesional agar mereka mampu membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepemimpinan secara mandiri dan kontekstual. Dengan demikian, strategi rekrutmen dan pembinaan kepala sekolah seharusnya dirancang sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan dan bermakna, bukan sekadar penugasan birokratis.

Sayangnya, pada praktiknya masih ditemukan pengangkatan kepala sekolah berdasarkan pertimbangan politis atau balas jasa, bukan hasil dari proses pembinaan yang konstruktif dan objektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar konstruktivisme yang menekankan pembentukan kompetensi melalui proses aktif, reflektif, dan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan sistem pembinaan kepala sekolah yang berbasis pada teori konstruktivisme menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan rendahnya mutu pendidikan, terutama dalam era perubahan yang dinamis seperti saat ini.

B. Landasan Enam Sistem Nilai

Di era kompleksitas dan turbulensi seperti dewasa ini, sering sekali di hadapkan kepada kenyataan bahwa konsep-konsep yang dahulu diandalkan mampu memecahkan masalah penting, sekarang tidak lagi. Hal ini karena masalah yang dihadapi seiring memiliki dimensi yang sangat kompleks. Karena itu dibutuhkan kosep baru, yang salah satunya adalah enam sistem nilai.

Konsep yang ditawarkan Sanusi, A., (2015), adalah enam system nilai, yaitu nilai teologis, nilai etis-hukum, nilai estetika, nilai logis-rasional, nilai fisik-fisiologik dan nilai teleologic. Sistem nilai ini tidak bersifat hierarkis, namun lebih menitik beratkan kepada kompleksitas dan *chaos*, Hal ini berarti bahwa Tindakan yang dipilih tergantung kepada pilihan yang diutamakan dalam menghadapi satu permasalahan, sesuai dengan konteks yang berbeda-beda.

Rincian katagori keenam sistem nilai menurut Sanusi, A., (2015:35), sebagai berikut:

1. Nilai *teologis* adalah adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah, seperti keyakinan adanya sang pencipta Allah SWT., pengamalan rukun Iman, rukun Islam, Ihsan.
2. Nilai *etis-hukum* adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan norma-norma moral dan hukum, seperti sikap hormat, rendah hati, setia, jujur, bertanggung jawab, damai, tidak meludah di depan orang lain dan toleransi.
3. Nilai *estika* adalah nilai- nilai yang berkaitan dengan keindahan, seperti kecantikan, kebersihan,, keserasian, romantik, dan cinta kasih.

4. Nilai *logis-rasional* adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan penalaran dan kejelasan, seperti logika yang cocok antara fakta dan Kesimpulan, kejelasan, identitas, dan proses yang tepat
5. Nilai *fisik-fisiologis* adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek fisik dan *fisiologis*, seperti ukuran, kekuatan, perubahan, lokasi dan sebab akibat.
6. Nilai *teleologis* adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi, seperti kegunaan, kemanfaatan, kemajuan, keteraturan, produktivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi

Uraian keenam sistem nilai apabila dikaitkan dengan Strategi Dinas Pendidikan Dalam Membina Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), sebagai berikut:

1. Nilai Teologis

Nilai Teologis mengacu pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam Islam, konsep ketuhanan berpusat pada keyakinan kepada Allah SWT, sebagaimana terkandung pada ajaran Islam mencakup iman, Islam, dengan ihsan.

Iman mencerminkan keyakinan kepada:

- a. Keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan beserta sifat-sifat-Nya.
- b. Keberadaan malaikat-malaikat Allah.
- c. Kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah.
- d. Para nabi dengan rasul sebagai utusan Allah.
- e. Kepastian adanya hari kiamat.
- f. Ketentuan takdir (qada dengan qadar) baik maupun buruk.

Islam, sebagai praktik keimanan, memiliki lima rukun utama:

- a. Mengucapkan syahadat sebagai bentuk pengakuan akan keesaan Allah dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW.
- b. Melaksanakan salat lima waktu.
- c. Menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial.
- d. Berpuasa di bulan Ramadan.
- e. Menunaikan ibadah haji bagi mampu.

Ihsan memiliki dua dimensi utama, yaitu:

- a. Hubungan dengan Allah, yaitu beribadah seolah-olah melihat-Nya, atau meyakini bahwa Allah selalu mengawasi.
- b. Hubungan dengan sesama makhluk, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dengan lingkungan sekitar.

Nilai teologis sudah tertanam pada diri manusia bahkan sebelum mereka diciptakan secara fisik, sebagaimana firman Allah pada QS. Al-A'raf: 172 menegaskan bahwa setiap manusia telah bersaksi atas keesaan-Nya di alam ruh.

Ketika nilai teologis diterapkan pada kehidupan, ia memberikan ketenangan jiwa dengan raga bagi pemeluknya. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mampu menjadi dasar pada membentuk pola pikir dengan perilaku seorang Muslim berlandaskan kebenaran dengan hukum Islam. Proses pembelajaran pada perspektif teologis merupakan bentuk ikhtiar pada mengelola sekolah secara terencana dengan sistematis, guna menciptakan lingkungan pendidikan bercirikan Islam mampu melahirkan generasi berprestasi dengan meningkatkan kinerja sekolah selaras dengan ajaran-Nya.

2. Nilai Logik

Proses pembelajaran mampu dikategorikan sebagai nilai logik, berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dengan mengingat. Nilai ini menjadi dasar pada bertindak dengan mengambil keputusan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berulang kali menyeru manusia menggunakan akalunya, seperti pada QS. Ali Imran: 190, menegaskan bahwa penciptaan alam semesta merupakan tanda bagi orang-orang berpikir.

Allah juga berfirman pada QS. An-Nahl: 67, menunjukkan bahwa pemanfaatan akal mampu membantu manusia membedakan antara bermanfaat dengan merugikan.

Berpikir secara logis harus terus berkembang identik dengan usia dengan tingkat kematangan seseorang. Jika bayi menggunakan naluri, anak-anak berpikir secara imitatif (meniru), maka orang dewasa harus

mampu berpikir kreatif dengan inovatif, serta menghindari pola pikir egois. Dalam dunia pendidikan, nilai logik ini harus terus diterapkan perlu pemerintah maupun tenaga pendidik agar pengambilan keputusan pada sistem pendidikan selalu berbasis rasionalitas dengan manfaat.

Akal juga berperan pada membedakan antara benar dengan batil, serta memperkuat keimanan seseorang. Dalam QS. Ali Imran: 7, Allah menegaskan bahwa hanya orang-orang berakal mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Nya.

Dalam Islam, akal memiliki kedudukan tinggi dengan sering dimanfaatkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta pengajaran agama. Beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa Islam agama rasional mengedepankan pemikiran logis dengan argumentasi. Namun, pada pemikiran Islam, akal tetap berada di bawah wahyu. Akal digunakan memahami wahyu, bukan menentangnya. Oleh karena itu, pada Islam tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu, melainkan keduanya saling melengkapi pada menjelaskan kebenaran.

3. Nilai Fisik/Fisiologi

Nilai fisiologis berkaitan dengan pemanfaatan fungsi fisik pada kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, tubuh manusia merupakan ciptaan Allah memiliki manfaat besar, namun sering kali potensi ini tidak dimaksimalkan. Hal ini menyebabkan umat Islam tertinggal pada bidang sains dengan teknologi. Al-Maududi, seorang pembaharu Islam, mengkritik umat Islam tidak mengoptimalkan potensi diberikan Allah, seperti pendengaran (as-sam'), penglihatan (al-bashar), dengan hati (fuad). Dalam QS. An-Nahl: 78, Allah menjelaskan bahwa ketiga anugerah ini diberikan agar manusia bersyukur dengan menggunakannya kebaikan.

Dalam perspektif pendidikan, proses pembelajaran juga didasarkan pada nilai fisiologis. Islam mengajarkan umatnya menjaga kesehatan dengan kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Praktik seperti berwudhu, mandi janabah, serta penggunaan air pada bersuci menunjukkan bahwa Islam menekankan kebersihan fisik. Selain itu,

ibadah puasa juga memberikan manfaat kesehatan dengan memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan, bekerja tanpa henti selama 11 bulan. Dengan menerapkan gaya hidup sehat identik ajaran Islam, umat Muslim mampu lebih optimal pada menjalankan perannya, termasuk pada dunia pendidikan.

Dengan demikian, penerapan proses pembelajaran tidak hanya melibatkan aspek spiritual dengan intelektual, tetapi juga aspek fisik, sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan seimbang, sehat, dengan berkualitas.

4. Nilai Etik

Nilai etik mencakup sikap hormat, mampu dipercaya, serta keadilan, semuanya berhubungan erat dengan akhlak seseorang. Namun, pada realitas kehidupan saat ini, nilai-nilai tersebut sering kali terabaikan, baik perlu individu kurang berpendidikan maupun mereka memiliki latar belakang akademik tinggi. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan penting, sebagaimana ditegaskan pada Al-Qur'an bahwa Rasulullah suri teladan terbaik bagi umat manusia:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dengan (kedatangan) hari kiamat dengan Dia banyak menyebut Allah" (Q.S. Al-Ahzab: 21).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan pada hadis bahwa beliau diutus menyempurnakan akhlak manusia:

"Saya diutus menyempurnakan budi pekerti (akhlak)." (Hadis Nabi)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jika tidak diiringi perlu nilai-nilai etika, maka kemajuan tersebut justru mampu menjadi ancaman bagi umat manusia. Hal ini terlihat pada berbagai kasus seperti peperangan dengan eksploitasi lingkungan akibat pemanfaatan ilmu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam konteks pendidikan, proses pembelajaran menjadi salah satu bentuk penerapan ilmu mengelola

lembaga pendidikan secara efektif. Proses pembelajaran melalui prinsip-prinsip manajemen baik dengan berbasis nilai-nilai etika.

5. Nilai Estetika pada Pendidikan

Nilai estetika berkaitan dengan keindahan, keseimbangan, dengan keharmonisan, baik pada hubungan sosial maupun pada lingkungan sekitar. Allah menciptakan alam dengan segala keindahannya tidak hanya dimanfaatkan tetapi juga agar manusia mampu merasakan keteraturan dengan keseimbangan di dalamnya. Kasih sayang dengan keindahan merupakan bagian dari fitrah manusia dianugerahkan perlu Allah SWT, sebagaimana disebutkan pada Al-Qur'an:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dengan merasa tenteram kepadanya, dengan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dengan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir." (Q.S. Ar-Ruum: 21)

Dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah melalui proses pembelajaran, aspek estetika berperan penting, terutama pada gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan metode pembelajaran digunakan perlu para guru. Seorang pemimpin pendidikan perlu mencontoh seni kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan kelembutan pada berkomunikasi, berbicara dengan intonasi baik, serta membangun hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dengan bermusyawaratlah dengan mereka pada urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah."

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya."
(Q.S. Ali Imran: 159)

6. Nilai Teleologi pada Pendidikan

Nilai teleologi berorientasi pada manfaat, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dengan akuntabilitas pada setiap aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu diperintahkan atau dilarang memiliki hikmah dengan manfaat bagi manusia serta lingkungannya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dengan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dengan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'."* (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Rasulullah SAW juga bersabda: *"Sebaik-baik kamu orang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."* (Hadis Nabi)

Dalam pandangan materialisme, alam dianggap tidak memiliki sasaran tertentu karena diyakini ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Teori evolusi, misalnya, menganggap bahwa kehidupan berlangsung sebagai hasil seleksi alam. Namun, pada Islam, setiap ciptaan Allah memiliki sasaran telah ditetapkan-Nya. Seluruh unsur di alam semesta, mulai dari mikroorganisme hingga makhluk besar seperti paus dengan gajah, saling bergantung menciptakan keseimbangan ekosistem sempurna.

Konsep teleologi ini juga relevan pada konteks pendidikan, terutama pada proses pembelajaran bertujuan agar sistem pendidikan berjalan secara efisien, produktif, dengan memberikan manfaat lebih baik bagi peserta didik serta masyarakat secara luas. Dengan demikian, MBM menjadi salah satu ikhtiar pada mewujudkan cita-cita pendidikan lebih maju dengan identik dengan kebijakan berlaku di Indonesia.

C. Landasan Teori

1. Manajemen Strategis

Manajemen suatu tahap melibatkan pengelolaan, pengaturan, dengan pemanfaatan sumber daya pada suatu organisasi. George R. Terry (1972:4) menyatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian tahap mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengendalian, dilakukan menentukan serta menca sasaran telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

Griffin (2013) menambahkan bahwa manajemen mencakup serangkaian aktivitas seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dengan pengendalian diarahkan pada sumber daya organisasi—baik manusia, finansial, fisik, maupun informasi—guna menca sasaran secara efisien dengan efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen diartikan sebagai tahap pemanfaatan sumber daya secara optimal guna menca sasaran tertentu. Dalam praktiknya, konsep manajemen sering dikaitkan dengan administrasi. E. Mulyasa (2007:19) menjelaskan bahwa terdapat tiga pandangan terkait hubungan antara manajemen dengan administrasi. Pertama, administrasi dianggap lebih luas daripada manajemen, di mana manajemen merupakan inti dari administrasi. Kedua, manajemen dianggap lebih luas daripada administrasi. Ketiga, manajemen dengan administrasi dipandang sebagai konsep identik.

Dalam perspektif Islam, meskipun istilah manajemen tidak disebutkan secara eksplisit pada Al-Qur'an, konsepnya tercermin pada kata *yudabbiru* berarti mengarahkan, melaksanakan, mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, serta menyusun rencana telah ditetapkan. Kata ini terdapat pada beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. Yunus (10:31), Q.S. Ar-Ra'd (13:2), dengan Q.S. As-Sajadah (32:5).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, manajemen mampu disimpulkan sebagai suatu tahap terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengawasan, dilakukan menca sasaran organisasi

dengan memanfaatkan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya secara efektif dengan efisien.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1, menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dengan pendidikan menengah harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Hadiyanto (2004:63), MBS pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa tahap pendidikan tidak mampu berjalan optimal jika sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Pendidikan bukanlah sebuah tahap mekanis seperti di pabrik mampu beroperasi secara otomatis setelah program dijalankan. Sebaliknya, pendidikan melibatkan interaksi antara berbagai elemen input serta keterkaitan hasil pendidikan dengan lingkungan sekitarnya.

Secara etimologis, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *manajmen* diartikan sebagai tahap pemanfaatan sumber daya secara efektif menca sasaran; merujuk pada lembaga pendidikan tempat tahap belajar-mengajar berlangsung. Mampu dimaknai sebagai pengelolaan sumber daya berpusat pada sekolah pada menjalankan tahap pembelajaran.

E. Mulyasa (2007:24) menjelaskan bahwa merupakan bagian dari reformasi pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Otonomi pada manajmen memberikan kesempatan bagi sekolah mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara langsung, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Dalam pendekatan, pola pengelolaan pendidikan mengalami pergeseran dari sistem sepenuhnya dikendalikan perlu pemerintah pusat menuju sistem memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah itu sendiri. Nanang Fatah (2003:8) menegaskan bahwa strategi bertujuan merancang ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan kepada kepala sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat—termasuk guru, siswa, komite sekolah, orang tua, dengan masyarakat—pada upaya meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Sistem ini mengubah mekanisme pengambilan

keputusan dengan mendistribusikan kewenangan kepada para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, model pengelolaan pendidikan memberikan sekolah otonomi lebih besar pada pengelolaannya. Pergeseran paradigma ini memungkinkan sekolah lebih mandiri pada mengambil keputusan, memanfaatkan sumber daya internal secara optimal, serta melibatkan seluruh elemen sekolah—termasuk kepala sekolah, tenaga pendidik, siswa, orang tua, dengan masyarakat—guna meningkatkan mutu pendidikan identik dengan kebijakan pendidikan nasional dengan regulasi berlaku.

Penerapan di berbagai sekolah di Indonesia telah dilakukan, meskipun masih terdapat indikasi ketidaksiapan pada pelaksanaannya. Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap sekolah, sementara pada kenyataannya, sekolah masih menghadapi tantangan pada hal tenaga pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen. memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi sekolah pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi memungkinkan sekolah menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala sekolah juga didorong semakin profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer sekolah.

Lebih jauh mendorong kepala dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, sekolah mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, dengan pengawasan pendidikan pada jenjang anak usia dini, dasar, dengan menengah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah. Implementasi MBM harus mencerminkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dengan akuntabilitas.

Diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian mampu dibangun melalui berbagai strategi, seperti pengembangan unit usaha sekolah, kerja sama dengan pihak eksternal di bidang komersial, serta inisiatif lain mampu meningkatkan pendapatan dengan program pendidikan. Prinsip kemitraan mengacu pada kerja sama antara sekolah dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan utama dari kemitraan meningkatkan keterlibatan serta dukungan masyarakat pada bentuk moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan dijalin mampu disesuaikan dengan keperluan dengan kondisi sekolah, dengan memastikan bahwa kerja sama dibangun bersifat saling menguntungkan.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat

peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Penerapan Manajemen bertujuan meningkatkan keterlibatan serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Melakukan perencanaan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan. Menurut Ahmad Rozikun dengan Namabuddin (2001:13), kesuksesan MBM memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan:

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap

anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru

menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks yang tersedia di sekolah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast ber. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala sekolah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam . Kepala sekolah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui

bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran di MTs Nurul Jalal sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam , baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara . Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan . Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Sejalan dengan pendapat A. Malik Fadjar (2002:37), keberhasilan bergantung pada dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah daerah, komite sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, tokoh masyarakat, dengan peserta didik. Pengambilan keputusan secara

kolektif di antara para pemangku kepentingan di tingkat sekolah menjadi faktor utama pada implementasi. Manajemen pendidikan diterapkan melalui MBM bertujuan memberdayakan sekolah sebagai unit pelaksana utama pada tahap pembelajaran. Dengan pendekatan ini, sekolah diharapkan lebih mandiri, inovatif, serta mampu menciptakan iklim kompetitif sehat antar sekolah pada suatu wilayah. Selain itu, sekolah juga memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap para pemangku kepentingan pendidikan, khususnya orang tua dengan masyarakat, pada era otonomi ini turut berperan pada dewan sekolah.

2. Kompetensi

Kompetensi ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Merupakan aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari

masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Bertujuan meningkatkan keterlibatan kesuksesan memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan Program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan

sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber

belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Jadi, pengertian pembelajaran menurut para ahli adalah kunci untuk pengembangan pribadi, peningkatan keterampilan, dan kemajuan masyarakat. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan

finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama.

Mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan

dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu

dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Penerapan Manajemen bertujuan meningkatkan keterlibatan memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis

sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan.

Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu

berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. memperkuat tanggung jawab kepala sekolah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan:

Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis

komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks yang tersedia di sekolah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast ber. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala sekolah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam . Kepala sekolah berharap ada

pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran di MTs Nurul Jalal sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam

mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam , baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara . Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan . Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Perlu semua pihak terlibat mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional,

sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu

cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Penerapan Manajemen bertujuan kesuksesan memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat.

3. Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di lingkungan satuan pendidikan yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola seluruh aspek sekolah, baik dari segi manajerial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga membangun hubungan dengan masyarakat. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan memastikan tercapainya tujuan pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dijelaskan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah serta pengembangan profesionalitas seluruh warga sekolah.

Peran kepala sekolah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner. Mereka diharapkan mampu menjadi pemimpin instruksional (*instructional leader*), yaitu pemimpin yang mendorong inovasi pembelajaran, membina guru secara profesional, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

Pengajaran di Indonesia sudah ada atau terjadi sejak zaman kolonial. Bahasa asing adalah istilah yang digunakan pada jaman sekarang. Di Indonesia pada jaman kolonial, bahasa asing (seperti bahasa Belanda sebagai bahasa penjajah, serta dan Jerman) telah diajarkan di sekolah-sekolah tertentu, dan diperuntukan bagi mereka berketurunan bangsawan dan anak-anak Belanda. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu

ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan

pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru

menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks yang tersedia di sekolah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast ber. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala sekolah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam . Kepala sekolah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui

bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wawancara juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran di MTs Nurul Jalal sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam , baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara . Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan . Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip

keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan.

Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga

pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

Memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama

antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka

akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi,

4. Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi kepala sekolah adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam mengelola satuan pendidikan. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan. Pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi

perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan.

Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Berkomunikasi pasti dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik itu dua orang, tiga orang, empat orang, maupun secara berkelompok. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Aspek penting pada pengelolaan sekolah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks yang tersedia di sekolah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast ber. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala sekolah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan

bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam . Kepala sekolah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran di MTs Nurul Jalal

sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam , baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara . Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan . Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus

mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

5. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan adalah lembaga atau unit pelaksana teknis yang berada di bawah pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas ini merupakan representasi dari negara dalam mengelola dan mengawasi sistem pendidikan formal di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan nasional.

Secara umum, Dinas Pendidikan memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan bertugas mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tingkat daerah.

2. Pengelola satuan pendidikan Dinas ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan sekolah-sekolah negeri (SD, SMP, SMA/SMK) sesuai jenjang kewenangan, termasuk pengangkatan kepala sekolah, pendistribusian guru, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
3. Fasilitator peningkatan mutu pendidikan Dinas Pendidikan berperan dalam merancang dan melaksanakan program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan profesional lainnya.
4. Pengawas dan evaluator pelaksanaan pendidikan Dinas juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan kurikulum, serta mengevaluasi capaian mutu pendidikan secara berkala.
5. Pemberi layanan pendidikan Dinas Pendidikan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan dan permasalahan pendidikan, termasuk layanan beasiswa, pendidikan inklusif, dan pendidikan khusus.

Dalam konteks manajemen pendidikan, Dinas Pendidikan memainkan peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah. Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada efektivitas dan integritas Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

Keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya.

Sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan

dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. memperkuat tanggung jawab kepala sekolah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial.

Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan.

Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga

merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan. Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar.

D. Landasan Kebijakan

Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan. Adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada mencapai keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah di dalamnya.

Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa kebijakan itu berperan penting dalam rangka untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Dari tahun ke tahun pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Secara harfiah istilah "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani "polis" yang merujuk pada negara, kemudian melalui bahasa Latin menjadi "politia" yang juga berarti negara. Dalam , istilah ini menjadi "policy" yang mengacu pada kebijakan. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, sekolah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu sekolah.

Setiap kebijakan dengan keputusan diambil untuk meningkatkan akuntabilitas, sekolah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap

pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran sekolah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan sekolah, misalnya pada restrukturisasi sekolah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala sekolah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. Kepala sekolah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota sekolah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf sekolah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan sekolah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat.

Dengan demikian, majelis sekolah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota sekolah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, sekolah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi sekolah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke sekolah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian sekolah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong sekolah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan sekolah.

Beberapa pakar memberikan definisi-definisi bervariasi tentang kebijakan, dengan membedakan definisi kebijakan menjadi dua penekanan utama. Pertama, penekanan pada tujuan utama dan maksud dari kebijakan.

Kedua, penekanan pada dampak dari tindakan pemerintah. Kategori definisi kebijakan publik ini diuraikan oleh Leslie A. Pal dalam Widodo (2010).

E. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
1	Hamdani, dkk (2020)	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah melalui Diklat Penguatan	Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi kepala sekolah sebelum diklat penguatan pada SD se-kecamatan Cikancung tinggi. Kemudian kompetensi kepala sekolah sesudah diklat penguatan pada SD se-kecamatan Cikancung sangat tinggi. Kompetensi kepala sekolah sebelum dan sesudah diklat penguatan paling rendah yaitu kompetensi kewirausahaan sub indikator unit usaha dan paling tinggi yaitu kompetensi kewirausahaan sub indikator tupoksi kepala sekolah.	Jurnal UPI
2	Hatimah ,H (2023)	Kompetensi Kepala Sekolah Dalam Melaksanakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi	

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
		Kewirausahaan Di SMA Negeri 3 Palangka Raya	kewirausahaan agar bisa memberikan semangat (motivasi) kepada guru sebagai tenaga pengajar dan peserta didik dalam berwirausaha. Kompetensi kewirausahaan berupa inovasi yaitu kepala sekolah sebagai pencetus dan pencipta sesuatu yang kreatif dan menuangkannya ke dalam program kerja kepala sekolah agar dapat direalisasikan.	
3	Nurussalami (2015)	Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MTsN Tungkop	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan kepala sekolah dalam menyusun program kerja dalam meningkatkan kinerja guru, sudah terlaksana, seperti Program kegiatan peningkatan kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran dan rapat penyusunannya dilakukan pada akhir tahun pelajaran,	Jurnal Ilmiah Pendidikan Elektro Vol 1, No 1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			Kegiatan MGMP yang dilaksanakan pada setiap sore sabtu dan dua minggu sekali dalam satu bulan, Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikan, Kepala sekolah juga menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah, melaksanakan supervisi, diskusi dan rapat dengan guru, sehingga kinerja guru meningkat. (2) Pendekatan kompetensi yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru pada sekolah MTsN adalah: Pendekatan kepemimpinan lain juga kepala sekolah melakukan, dengan pembinaan pengembangan kemampuan profesional guru baik yang dilakukan oleh kepala sekolah yang semua ini memiliki tujuan untuk memberikan	

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			kesempatan kepada guru dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan perkembangan informasi dan kemajuan teknologi. Karena guru memiliki kemampuan yang tinggi akan terbuktinya dari keberhasilan dalam melaksanakan proses belajar mengajar dalam meningkatkan kinerja sekolah dan guru. (3) Hambatan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru, yaitu ketidaksesuaian antara pelajaran dengan minat, sehingga guru mengalami kesulitan dalam mengajar. Apalagi tuntutan kurikulum, agar pelajaran pada MTsN dapat diajarkan oleh guru bidang studi yang profesional. Hambatan lain yang dihadapi oleh kepala sekolah adalah disiplin guru yang masih kurang dalam mengajar, serta mengatur	

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			administrasi kelas. Maka kepala sekolah mengadakan	
4	Subagia I.W. (2012)	Penilaian Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru dalam Bekerja di Sekolah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kompetensi kepala sekolah dan guru dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penilaian keprofesionalan dan kepribadian. Cara yang digunakan untuk menilai kompetensi kepala sekolah dan guru adalah dengan cara observasi secara terus menerus, baik kinerja maupun hasil kerjanya. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian kompetensi kepala sekolah dan guru di sekolah dilakukan sesuai dengan tindakan atau aktivitas yang dilakukan selama bekerja.	Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 45, Nomor 3,
5	Rasidi, dkk (2017)	Kompetensi kepala Sekolah Dalam <i>Instructional</i>	Temuan analisis deskriptif kualitatif, yaitu kondisi kompetensi kepemimpinan pembelajaran kepala	Jurnal.umj.ac.id/index.php/holistika

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
		<i>Leadership SD</i> Negeri Berpotensi Bencana di Kabupaten Magelang	sekolah pada kondisi berpotensi bencana SD Krinjing 2 Magelang, berada pada kategori baik. Skor total kepala sekolah Kompetensi kepemimpinan pembelajaran yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 922. Total skornya adalah dibandingkan dengan skor maksimal untuk mengetahui berapa persen kompetensi kepala sekolah dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan total kompetensi sebesar 82,59%. Faktor dominan yang mempengaruhi dalam Kompetensi kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah adalah: 1) kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus mempunyai visi organisasi yang jelas dan dapat dipahami, 2) adanya upaya yang mendekati tujuan tersebut siswa,	Volume 1 No.1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			3)melibatkan guru dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya, 4)menciptakan kurikulum yang mantap/tetap, dan harus bersifat dinamis, 5)menjadikan jaringan kerjasama sekolah yang kuat dan menguntungkan	
6	Praditia, A. (2011)	Strategi pemerintah dalam meningkatkan kompetensi manjerial kepala sekolah: penelitian di dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Hasil penelitian, strategi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah sudah baik sesuai dengan tuntutan undang-undang, menitik beratkan pada kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, peningkatan kesejahteraan dan beasiswa untuk pendidikan selanjutnya. Strategi yang dilakukan dan dilaksanakan adalah: (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, (2) Pembinaan Pengawas dalam bidang supervisi manajerial kepala sekolah	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan,

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			dan mengadakan workshop, (3) Peningkatan kesejahteraan dan kualifikasi kepala sekolah, (4) Melakukan Pertukaran Kepala sekolah antar Provinsi, (5) Melakukan Studi Banding, (6) Diskusi antara Kepala Sekolah, (7) Lokakarya dan seminar serta Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial tentang Manajemen Sekolah. Kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah adalah (1) Anggaran dana yang kurang memadai, sehingga pendidikan dan pelatihan yang diberikan dalam waktu yang terbatas, (2) Kurang optimalnya penyediaan konsep pembinaan dan pengembangan karir yang bersifat komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, (3) Sinkronisasi waktu	

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			pertemuan pengawas dan kepala sekolah yang kurang optimal.	
7	Siregar R.P (2022)	Kinerja Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kompetensi Guru SD Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatra Utara	Hasil/Temuan: terdapat beberapa temuan penelitian seperti program yang belum mencapai target, kurangnya responsivitas dinas terhadap tuntutan kebutuhan guru, tidak sesuai nya realisasi penggunaan anggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan, masih banyaknya data yang belum dipublikasikan di website Dinas Pendidikan, serta terdapat kesenjangan dalam pelayanan dan banyaknya sarana prasarana yang rusak Kesimpulan: Kinerja Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi Guru SD di Kabupaten Labuhan Batu Selatan diukur berdasarkan teori pemberdayaan. Terdapat beberapa faktor	http://eprints.ipdn.ac.id/11571/1/RINGKASAN%20RICCI%20%281%29.pdf

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			penghambat seperti kurangnya sosialisasi dinas pendidikan dalam meningkatkan kompetensi guru SD, antusias guru SD, serta adanya beberapa hambatan dari guru maupun dari sekolah. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah menerapkan tahap pengorganisasian, tahap interepasi dan tahap implementasi kebijakan	
8	Astika, dkk (2020)	Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo sudah memenuhi standar kualifikasi umum 100 %, sedangkan untuk standar kualifikasi khusus sekitar 56%. Hambatan yang terjadi dalam implementasi yaitu kurangnya sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala SMP,	Cermin: Jurnal Penelitian Volume 4 , Nomor 2,

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			lambatnya informasi yang disampaikan, minimnya dedikasi dan tingkah oknum yang menghambat jalanya implementasi, dan kurangnya koordinasi antar birokrasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu memperbanyak sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala sekolah, menegur dan membina staff agar tepat waktu dalam menyampaikan informasi, memberikan insentif yang lancar kepada birokrasi, dan birokrasi dituntut agar bekerja sesuai SOP yang telah ada pada pekerjaan tersebut	
9	Hidayat, dkk (2021)	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kemajuan SD	Hasil penelitian menunjukkan (1) kepala sekolah merupakan seseorang yang diberi tugas untuk memimpin sebuah sekolah, (2) kepemimpinan	Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan Vol 7 No 1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
		Muhammadiyah Jogokariyan	yang dimaksud adalah kemampuan untuk mempengaruhi sumber daya organisasi untuk bergerak mengikuti perintah untuk mencapai tujuan, (3) kepemimpinan kepala sekolah yang efektif ditinjau dari kepemimpinan entrepreneur, teladan, cerdas, dan demokratis, (4) abad 21 adalah era kemajuan teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, (5) Ciri abad 21 yaitu informasi yang tersedia dimana saja dan dapat diakses kapan saja, komputasi yang semakin cepat, serta komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kemana saja, (6) Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah untuk menghadapi abad ke-21 yaitu dimensi kompetensi kepribadian,	

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan social	
10	Soro, dkk (2023)	<i>Analysis of Academic Supervision Competence through Workshop Activities</i>	<i>The results of the study indicated that if the workshop activity is carried out based on proper planning and implementation in accordance with the principles of the workshop itself, it can increase the competence of academic supervision to add experience to the supervisor himself. In other words, the supervisors and teachers participating in the workshop activities each gain new knowledge for the teacher and new experiences for the supervisor</i>	QALAMUN A: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia Accredited Sinta 2 Volume 15 Number 1 January-June Page: 61-72
11	Muhlasin (2018)	Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah Dalam Menyusun KTSP Melalui Pembinaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terprogram dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dasar dalam Menyusun	Jurnal Sosialita, Vol. 10, No.1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
		Terprogram	KTSP. Nilai rata-rata tes awal adalah 65, sedangkan nilai rata-rata tes akhir 80, ada kenaikan 23,1%. Kepala sekolah dapat menjawab secara runtut pertanyaan mengenai KTSP, dapat menjelaskan prosedur dan isi KTSP. Tim di bawah pimpinan kepala sekolah dapat menyusun KTSP yang sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan KTSP di Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh BSNP.	
12	Solihan (2023)	Pentingnya Kompetensi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan	Kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Kompetensi ini memainkan peran kunci dalam mempengaruhi keberhasilan kerja, terutama	Pendas Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Penerbit /Jurnal
			dalam pekerjaan-pekerjaan yang menuntut sungguh-sungguh inisiatif dan inovasi. Dengan memiliki kompetensi tersebut, kepala sekolah dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Karena dengan hal tersebut, lingkungan sekolah yang positif akan terbentuk, dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa sekarang ini.	